

BAB IV

EFEKTIVITAS REZIM UNDAF 2008-2012 DALAM MENGATASI MASALAH *HUMAN SECURITY*

Pada bab II terdapat empat intervensi PBB dalam menyelesaikan masalah-masalah pada aspek *human security* yang timbul sejak berakhirnya genosida tahun 1994 di Rwanda sampai periode UNDAF 2008-2012. Intervensi yang pertama yaitu UNHRCFOR bekerja dalam bidang HAM, melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta laporan. Kinerja dari UNHRCFOR kemudian juga berkaitan dengan kinerja ICTR, dimana ICTR membutuhkan data yang dimiliki UNHRCFOR untuk menindak lanjuti kasus pelanggaran HAM selama genosida. Intervensi lainnya dalam menangani masalah *human security* di Rwanda adalah melalui rezim UNDAF 2002-2006, dan UNDAF 2008-2012, dimana kedua rezim tersebut menyatukan semua intervensi agen PBB lainnya kedalam sebuah *framework*.

UNDAF merupakan salah satu intervensi PBB yang kinerjanya mencakup seluruh aspek *human security*. UNDAF 2002-2006 fokus kepada masalah utama pasca genosida, kemiskinan dan perdamaian. Tahun-tahun awal pasca genosida merupakan tahun yang sulit untuk mengatasi masalah *human security* dan melakukan rekonstruksi di Rwanda, dimana indeks *human security* mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selama diberlakukannya *United Nations Development Assistance Framework* (UNDAF) tahun 2002-2006 dan 2008-2012, masing-masing bidang yang

menjadi bagian dari fokus masing-masing UNDAF memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Berbagai macam masalah di setiap bidang yang muncul pasca genosida, dari waktu ke waktu dapat diselesaikan melalui kerjasama dan bantuan berbagai pihak, khususnya PBB.

Framework yang terdapat dalam UNDAF 2008-2012 pada setiap bidangnya disesuaikan dengan program-program maupun standar dan strategi yang telah ada, sehingga dalam usaha mencapai tujuannya, tim UNDAF, pemerintah, maupun NGO dan pihak lainnya menjadi satu tim yang kuat. Dengan adanya kolaborasi yang harmonis dari berbagai pihak, maka untuk mewujudkan kemajuan pembangunan pada setiap bidangnya akan lebih mudah. Adanya kerjasama yang baik antar pihak, dan kesesuaian rencana dan strategi, dapat tercermin dari hasil ataupun pencapaian dari usaha tersebut. Dalam Intervensi PBB, semua rezim yang ada dapat dikatakan berhasil mewujudkan apa yang telah menjadi tujuannya.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga bidang dalam aspek *human security* yang menjadi fokus pembahasan, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Melalui intervensi PBB yang dimulai pasca genosida sampai pada rezim UNDAF 2008-2012, ketiga bidang tersebut selalu menunjukkan perkembangan yang baik. Berikut pencapaian-pencapaian yang dihasilkan oleh intervensi PBB melalui keempat rezimnya.

A. Meningkatnya Indeks Human Security

Pada bab III telah dipaparkan mengenai dampak genosida dalam aspek *human security*. Terdapat penurunan indeks *human security* pada masing-masing bidangnya. Di bidang ekonomi, menurut data yang ada, GDP Rwanda menurun di tahun terjadinya genosida dan beberapa tahun pasca terjadinya genosida. Penurunan juga terjadi pada bidang kesehatan dan di bidang pendidikan.

Melalui usaha untuk membangun kembali Rwanda pasca genosida, yang dilakukan oleh pemerintah Rwanda, dan pihak lainnya terutama PBB melalui UNDAF 2008-2012, indeks *human security* Rwanda dari tahun ke tahun pada setiap bidangnya mengalami peningkatan. Usaha dan program yang dilakukan di setiap bidangnya selalu diperbarui untuk mencapai target tertentu. Berikut pemaparan perkembangan dan pencapaian di masing-masing bidang melalui UNDAF 2008-2012 .

A.1. Perkembangan dan Pencapaian UNDAF 2008-2012 di Bidang Ekonomi

Pada UNDAF 2008-2012, perkembangan di dalam ekonomi dapat dilihat dari perkembangan di bidang sosial. Program pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang untuk menunjang kegiatan ekonomi adalah salah satu dari *framework* UNDAF 2008-2012 di bidang sosial, khususnya pada point pertumbuhan yang berkelanjutan”. Rwanda berkomitmen penuh untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai target ketahanan pangan.

Pada tahun 2011, menurut *National Institute of Statistic of Rwanda* (NISR) , GDP negara naik sebesar 7.1%. Kenaikan GDP ini utamanya, terkait dengan sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 31% dalam GDP Rwanda. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang terpenting dalam sektor ekonomi. PBB dan pemerintah juga terus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan sektor pertanian. Selain sektor pertanian, sektor non-pertanian juga mengalami perkembangan pada tahun 2011.⁵⁷

Tingkat kemiskinan di Rwanda juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010/2011 sekitar 44,9% populasi Rwanda hidup dalam kemiskinan yang sebelumnya mencapai angka 56,9% pada 2006. Target dalam menurunkan masalah kemiskinan semakin dinaikkan, dimana target pada tahun 2012/2013 adalah sebesar 24%. Pada tahun 2010/2011 target tersebut hampir tercapai yaitu pada angka 24,1%.⁵⁸

UNDAF 2008-2012 membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Rwanda melalui dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan diversifikasi produk untuk menaikkan pendapatan dan ketahanan pangan, dengan perhatian pada inovasi dan inovasi dan penambahan nilai. Strategi yang kedua adalah memperkuat sektor pemerintahan di bidang ekonomi dan fasilitas perdagangan.⁵⁹

⁵⁷ One UN Rwanda. (2012). *Annual Report 2011*. United Nations.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*.

A.2. Perkembangan dan Pencapaian UNDAF 2008-2012 di Bidang Kesehatan

Masalah di bidang HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang sangat mengancam Rwanda, dimana jumlah penderita HIV/AIDS di Rwanda meningkat pasca genosida. Tujuan dari UNDAF 2002-2006 dalam bidang ini adalah untuk mengurangi angka orang dewasa yang menderita HIV/AIDS. Pada tahun 2000 sebesar 13.7% sementara angka tersebut terus turun, dimana pada laporan tahun 2004 dan 2005 angkanya menjadi 5.1% dan 3.1%. Penurunan angka penderita HIV/AIDS ini menunjukkan bahwa rezim UNDAF 2002-2006 khususnya dibidang HIV/AIDS berjalan efektif, walaupun demikian, HIV/AIDS masih menjadi masalah yang tetap harus dihadapi pada tahun-tahun selanjutnya.

Pada bidang HIV/AIDS, yang menjadi *framework* UNDAF 2008-2012 sejalan atau bersinergi dengan *The National HIV and AIDS Strategic Plan 2009-2012* atau rencana nasional di bidang HIV/AIDS. NSP 2009-2012 menetapkan kerangka kerja nasional untuk respon multi-sektor yang komprehensif terhadap HIV. Adapun tiga tujuan utama dari NSP adalah :

1. Mengurangi setengah dari tingkat HIV pada populasi di tahun 2012
2. Mengurangi kerentanan dan kematian diantara orang-orang yang hidup dengan HIV, dan

3. Memastikan bahwa orang-orang yang terinfeksi dan terkena efek HIV mempunyai kesempatan yang sama seperti populasi lainnya.⁶⁰

Mitra lainnya yang bekerja sama dalam bidang HIV/AIDS diantaranya *The Rwanda Biomedical Centre/ Institute for HIV/AIDS Disease Prevention and Control (RBC/IHDPC)*, komite pengawasan AIDS di tingkat distrik dan mitra pembangunan lainnya⁶¹. Yang menjadi fokus dari rezim UNDAF 2008-2012 adalah pencegahan HIV/AIDS melalui program edukasi dan konseling, kerjasama antar pihak untuk memperkuat kebijakan mengenai HIV/AIDS, fasilitas bagi orang yang terinfeksi AIDS, penularan HIV dari ibu ke anak dan mengurangi diskriminasi kepada orang yang hidup dengan AIDS.

Target dari pemerintah Rwanda adalah penurunan penularan HIV dari ibu ke anak sampai pada angka dibawah 2% pada tahun 2015. Pada tahun 2011, sejalan dengan target ini, ibu negara Rwanda, istri dari Presiden Paul Kagame, Jeanette Kagame meluncurkan kampanye terkait target menurunkan tingkat penularan HIV dari ibu ke anak. Presiden Rwanda beserta istrinya juga menghadiri pertemuan yang membahas tentang HIV, yaitu *the High Level Meeting on HIV* yang digelar pada bulan Juni 2011 di New York.⁶²

Terkait dengan usaha untuk menurunkan penularan HIV dari ibu ke anak atau *Elimination of Mother to Child Transmission* yang selanjutnya disebut EMTCT, dibawah kepemimpinannya, UNICEF telah memberikan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

dukungan teknis dan finansial dalam pembentukan Rencana Strategis Nasional (NSP). Beberapa rencana strategis diimplementasikan di dua distrik di Rwanda yaitu Bugesera dan Nyanza. Adapun hasilnya adalah peningkatan pada kapasitas fasilitas kesehatan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, di distrik yang menjadi tempat uji coba.⁶³

Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah pemberian pelatihan kepada 33 penyedia layanan kesehatan dalam hal perencanaan keluarga dengan tujuan pencegahan terhadap kehamilan yang tidak disengaja untuk perempuan yang positif mengidap HIV. Pelatihan juga diberikan kepada 40 penyedia layanan kesehatan pencegahan MTCT secara komprehensif, sementara 1.743 pekerja di bidang kesehatan telah dipersiapkan untuk mempromosikan pencegahan MTCT. Pada level distrik, di Bugesera, kampanye juga dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam perencanaan keluarga diantara perempuan yang terinfeksi HIV.⁶⁴

Penderita HIV/AIDS tidak seluruhnya orang dewasa, para remaja pun banyak yang terinfeksi HIV. Pada tahun 2011, PBB fokus kepada usaha meningkatkan kualitas perawatan dan pengobatan bagi orang-orang yang terinfeksi dan yang terkena dampak HIV, khususnya perempuan dan anak muda. Banyaknya remaja yang hidup dengan HIV belum mampu dijangkau oleh program-program HIV yang telah ada, termasuk program mengenai

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

kesehatan reproduksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, UNFPA dan UNICEF menginisiasikan pelayanan bagi penderita HIV yang termasuk remaja. ⁶⁵

Pelayanan yang bagi remaja yang hidup dengan HIV terkait pelayanan pada kesehatan seks dan reproduksi adalah melalui 22 fasilitas kesehatan. Sebanyak 10 pelatih nasional telah diberikan instruksi pada kesehatan remaja dan perkembangan dalam hal pengobatan dan perawatan HIV. Pada tahun 2012 materi pendidikan untuk remaja telah dibentuk, disamping itu sekitar 600 remaja yang terinfeksi HIV diberikan pelayanan dan perawatan psikososial. ⁶⁶

Perencanaan dan program di bidang HIV/AIDS ini tidak hanya berhubungan dengan bidang yang umum seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial saja tetapi juga berhubungan dengan bidang pertanian. ⁶⁷ Kekurangan makanan dan nutrisi adalah salah satu hal yang biasanya merupakan masalah bagi orang-orang yang menderita HIV/AIDS, maka dari itu kementerian kesehatan, WFP, WHO, dan UNHCR, juga bekerjasama dengan RBC/IHDPC meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi melalui pelatihan pertanian, pendidikan tentang nutrisi, dan pemberian makanan bagi penderita HIV/AIDS⁶⁸.

⁶⁵ *Ibid*,

⁶⁶ One UN Rwanda . (2013). *Annual Report 2012*. United Nations .

⁶⁷ One UN Rwanda . (2012). *Annual Report 2011*. United Nations .

⁶⁸ *Ibid*

A.3. Perkembangan dan Pencapaian UNDAF 2008-2012 di Bidang Pendidikan

Dalam data statistik mengenai angka pendaftaran siswa, dan angka penyelesaian pendidikan baik terhadap perempuan dan laki-laki keduanya mengalami kenaikan yang signifikan. Adanya kemajuan yang berkelanjutan pada akses edukasi merupakan salah satu alasan angka bersih pendaftaran siswa naik menjadi 95,4% pada tahun 2011. Angka penyelesaian pendidikan dasar juga mengalami kenaikan yang signifikan, dimana pada tahun 2008 besarnya sekitar 52.5%, lalu kemudian naik di tahun 2010 yaitu pada angka 75,6%. Pada tahun 2011, kenaikan angka penyelesaian sekolah kembali mengalami kenaikan, yaitu menjadi 78.6%.⁶⁹

Pada rentang waktu sebelum UNDAF 2008-2012, UNDAF 2002-2006 juga mempunyai fokus di bidang pendidikan. Ukuran yang menjadi indikator keefektifan UNDAF 2002-2006 pada saat itu adalah *net primary enrollment*, atau ukuran bersih siswa yang telah terdaftar untuk sekolah. Pada tahun awal UNDAF 2002-2006 dilaksanakan, angka *net primary enrollment* di Rwanda adalah sekitar 84% pada tahun 2002. Pada akhir masa berlaku UNDAF 2002-2006, angka tersebut terus mengalami kenaikan, sampai pada tahun 2006 angka tersebut mencapai sekitar 87%. Berdasarkan dari kenaikan indikator *net primary enrollment rate* di Rwanda, maka *framework* dari UNDAF 2002-2006 dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya.

⁶⁹ *Ibid.*

Keseimbangan gender dalam pendidikan dasar juga telah dicapai, dimana angka pendaftaran siswa perempuan yaitu sekitar 97.5% yang mana angka ini sedikit lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu sekitar 94,3%. Angka penyelesaian pendidikan sekolah dasar untuk siswa perempuan adalah 82% yang juga lebih tinggi daripada angka penyelesaian pendidikan dasar oleh siswa laki-laki yaitu sekitar 75%. Sementara pada angka putus sekolah mengalami penurunan yang cenderung stabil. Penurunan angka tersebut dari 12,2% pada tahun 2009/2010, menjadi sebesar 11,3% pada tahun 2010/2011 untuk perempuan, dan dari 12,3% ke 11,5% untuk laki-laki.⁷⁰

Seiring dengan keberhasilan Rwanda dalam mencapai target akses kepada pendidikan dasar secara universal, pada tahun 2011 PBB menguatkan dukungannya pada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada bidang pendidikan, reformasi dan transformasi institusinya mengalami kemajuan yang signifikan. Pembentukan *Rwanda Education Board* atau dewan pendidikan akan memberikan pendekatan yang komprehensif kepada poin-poin yang menjadi kunci kualitas pendidikan. PBB juga membantu dewan pendidikan dalam penyediaan materi kegiatan belajar-mengajar.

Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan bahwa masih terdapat masalah terkait dengan infrastruktur sekolah termasuk sistem sanitasi dan fasilitas bagi anak yang berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi masalah tersebut, *The Ministry of Education* atau kementerian pendidikan telah dibantu untuk

⁷⁰ *Ibid.*

melakukan revisi kebijakan kesehatan sekolah, maupun panduan kesehatan dan modul untuk pelatihan.

Pelatihan untuk para kepala sekolah, dan mobilisasi otoritas lokal pada kesehatan sekolah, dengan perhatian khusus pada nutrisi telah dilakukan di 10 distrik di Rwanda. Paket pelatihan memiliki fokus pada 6 bidang utama yaitu;

- Penyakit menular dan epidemi
- Kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga
- Nutrisi
- Kebersihan dan Sanitasi
- Olahraga
- Kesehatan Mental

PBB juga membantu kepada kementerian pendidikan dalam mengembangkan Kebijakan Nutrisi Sekolah.

PBB juga mendukung retensi anak melalui penyediaan komoditas pangan di 308 sekolah 348.515 anak yang mana 175.748 adalah anak perempuan dan 172.767 anak laki-laki. Pasokan non makanan untuk persiapan dan penyimpanan makanan juga didukung oleh PBB. Pada bulan Mei 2011 bantuan langsung yang berupa makanan diberhentikan sementara, hal ini dilakukan untuk menaikkan peran dan kontribusi dari komunitas. Pendekatan seperti dilakukan untuk membangun kapasitas nasional dan local dalam manajemen dan kelanjutan program nutrisi sekolah.

Kurangnya guru yang terlatih dan berkualitas masih menjadi masalah yang menghambat pencapaian-pencapaian pada bidang pendidikan dasar. Melalui kerjasama dengan *NGO Volunteer Service Overseas* , sebanyak 9 perguruan tinggi pelatihan dibantu untuk mendirikan dan melengkapi *teacher resource centre* atau pusat sumberdaya guru. Sejumlah 26 sekolah “sekolah-ramah” menerima pelatihan guru berbasis sekolah dengan metodologi yang terpusat pada anak, yang akan membantu guru untuk merubah cara penyampaian pelajarannya. Sebanyak 18 guru lainnya menerima pelatihan melalui model pelatihan guru berbasis sekolah.⁷¹

Saat ini sistem edukasi di Rwanda berjalan dengan baik. Bahasa utama yang digunakan di Rwanda adalah Kinyarwanda. Seluruh sekolah dasar di Rwanda menggunakan kinyarwanda sebagai bahasa utama dalam penyampaian materi sekolah. Pendidikan wajib di Rwanda berlangsung selama 9 tahun, mulai dari usia 7-15 tahun. Pendidikan sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun, sedangkan pendidikan untuk sekolah menengah bawah selama 3 tahun.

Pendidikan untuk sekolah menengah atas ditempuh selama 3 tahun, pada jenjang ini, siswa mendapatkan mata pelajaran yang umum, dan dibebaskan untuk memilih mata pelajaran khusus. Sistem edukasi terus menerus mengalami perkembangan. Dalam segala aspek, baik pemerintah maupun mitra kerjasama seperti PBB, dan lainnya terus mengembangkan sistem edukasi. Hal ini dapat terlihat dengan adanya gagasan atau rencana

⁷¹ *Ibid*

menuju kebijakan “wajib belajar selama 12 tahun” yang artinya wajib belajar sampai pada tingkat SMA.

Program bantuan untuk dewan pendidikan berlanjut pada tahun 2011. PBB membantu dewan pendidikan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah kurikulum kewirausahaan. Panduan guru dan siswa dalam kewirausahaan untuk siswa kelas 5 dan 6 mengalami perkembangan. Pada tingkat sekolah menengah bawah atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA, *Workshop* pada pengajaran pendidikan kewirausahaan juga digelar di sepuluh distrik melibatkan 332 guru.⁷²

Melihat dari data-data yang telah dipaparkan diatas, yang mana terdapat banyak sekali bantuan yang diberikan oleh PBB menunjukkan perkembangan dalam aspek *human security*. Data statistik menunjukkan perubahan yang positif dan signifikan pada hampir di seluruh bidangnya. Efektifitas rezim UNDAF 2008-2012 tercermin dalam terpenuninya tujuan UNDAF yang beriringan dengan tujuan Rwanda. Sesuai dengan efektifitas teori rezim, UNDAF 2008-2012 juga dikatakan efektif, karena pemerintah Rwanda sebagai aktor lainnya mematuhi, norma-norma dan peraturan yang dibentuk.

B. Terciptanya Positive Peace

Pada bab I telah dipaparkan ciri-ciri *positive peace* maupun usaha-usaha yang bertujuan untuk mencapai perdamaian positif tersebut. Pada masalah yang terjadi pasca genosida tahun 1994 di Rwanda, Intervensi yang dilakukan oleh

⁷² *Ibid.*

PBB yang juga disepakati dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Rwanda dan pihak lainnya merupakan intervensi yang bersifat positif. PBB berhasil untuk melakukan usaha-usaha perdamaian pasca genosida dengan pihak-pihak yang berkonflik.

Peningkatan kerjasama antara PBB, pemerintah Rwanda dan pihak lainnya, terus berjalan sesaat pasca konflik berakhir sampai pada masa rekonstruksi yang berjalan sampai pada saat ini. Intervensi PBB di Rwanda dilakukan dengan menemukan akar permasalahan atau penyebab terjadinya konflik yang terjadi. Hal ini sesuai dengan usaha-usaha untuk mencapai perdamaian positif yang telah dipaparkan. Setelah itu PBB melalui timnya di Rwanda menyusun dan merencanakan program-program untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pasca konflik, sehingga diharapkan konflik tidak kembali terjadi. Usaha PBB untuk mencapai perdamaian positif dilakukan melalui seluruh aspek kehidupan

B.1. Berakhirnya Konflik

Pasca genosida yang terjadi di Rwanda, konflik yang ada di Rwanda sampai saat ini telah selesai dan tidak terulang kembali. Hal ini dapat dilihat dari keadaan politik Rwanda yang cukup stabil dimana tidak terdapat pemberontakan, atau kekacauan politik, bahkan kelompok yang mengancam terjadinya kembali konflik. Hal ini semakin menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Rwanda sudah selesai. Pencapaian ini juga tidak terlepas dari

intervensi PBB, dimana pasca terjadinya genosida, PBB membentuk ICTR untuk.

Pasca genosida di Rwanda, fokus dari proses rekonsiliasi pada saat itu adalah kepada usaha-usaha untuk membangun kembali identitas Rwanda, menyeimbangkan kebenaran, keadilan, keamanan, dan perdamaian di negara tersebut. Pasca genosida berakhir, tujuan utama pemerintah Rwanda adalah terciptanya kembali integrasi masyarakat, dimana di dalam masyarakat tersebut terdapat korban dan bekas pelaku kejahatan yang nantinya akan hidup berdampingan dalam perdamaian. Proses rekonsiliasi pada tahap awal adalah dengan membawa kasus kejahatan pada saat genosida berlangsung ke pengadilan.

Proses Rekonsiliasi yang juga dilakukan oleh pemerintah selain pengadilan adalah dengan membentuk konstitusi yang baru, dimana konstitusi tersebut menyatakan bahwa semua warga Rwanda memiliki hak yang sama. Hal ini merupakan cara yang tepat, dimana undang-undang atau konstitusi yang berlaku di Rwanda tidak sepenuhnya menjunjung persamaan hak antar warga negaranya. Jauh sebelum itu, pada saat masa pemerintahan Belgia di Rwanda memberlakukan diskriminasi terhadap salah satu etnis yaitu Hutu, yang kemudian masih berjalan sampai pada saat Belgia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Hutu. Diskriminasi kemudian dilakukan oleh etnis Hutu yang berkuasa kepada etnis Tutsi.

Selain persamaan hak, undang-undang yang baru telah di sahkan untuk melawan diskriminasi dan ideologi genosida yang telah memecah belah Rwanda. Tanggung jawab utama untuk usaha rekonsiliasi di Rwanda terletak pada persatuan nasional dan komisi rekonsiliasi. Kegiatan utama di bidang rekonsiliasi adalah sebagai berikut ;

Ingando : Program pendidikan perdamaian di kamp-kamp solidaritas. Sejak tahun 1999 sampai 2009 lebih dari 900.000 masyarakat Rwanda berpartisipasi pada program ini. Tujuan dari program ini adalah untuk mengklarifikasi sejarah Rwanda dan asal mula pembagian populasi , serta untuk mempromosikan patriotisme dan melawan ideologi genosida

Itorero ry'highugu: Program ini didirikan pada tahun 2007. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Rwanda dan menumbuhkan pemimpin yang selalu berusaha untuk mengembangkan masyarakat. Sejak 2007 sampai tahun 2009 , sekitar 115.228 peserta mengikuti program ini.

KTT Nasional : Terdapat beberapa pertemuan tingkat tinggi nasional yang diselenggarakan sejak tahun

2000. Pertemuan tersebut mengambil topik-topik yang terkait dengan keadilan, pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, keamanan nasional dan sejarah nasional

Seminar : Pelatihan diadakan untuk para pemimpin *grassroot*, pemimpin partai politik, pemuda dan perempuan. Pelatihan yang diadakan adalah pelatihan dalam konseling terhadap trauma, mitigasi, dan resolusi konflik dan sistem peringatan dini.

Penelitian : Komisi persatuan dan rekonsiliasi nasional menerbitkan sejumlah studi dalam menyelidiki penyebab konflik di Rwanda dan studi tentang bagaimana mengurangi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Melalui intervensi PBB yaitu dalam bentuk nyatanya adalah pengoperasian *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* yang dibentuk saat genosida baru saja berakhir, sebagai salah satu jalan cara untuk melakukan rekonsiliasi, telah berjalan efektif. Efektifitas tersebut juga dibantu oleh proses pengadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Nasional di Rwanda. Masyarakat Rwanda juga sangat berpartisipasi dalam proses pengadilan,

dimana *Gacaca Courts* adalah pengadilan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat Rwanda untuk mengadili tidak kejahatan ringan pada saat genosida.

Hal-hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi, hukum, dan undang-undang mengenai HAM menjadi salah satu aspek yang terdapat dalam UNDAF 2008-2012. Peningkatan sistem dan mekanisme dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi dan *peace-building* di tingkat distrik dilakukan sesuai dengan *framework* UNDAF 2008-202. Terciptanya *positif peace* selain ditandai dengan berakhirnya konflik, dan tidak terulangnya konflik sampai saat ini, adalah dengan peningkatan-peningkatan di berbagai aspek. Program yang dibentuk PBB pada masing-masing bidangnya, tidak akan tercapai bila tidak ada dukungan dari masyarakat yang bersatu.

B.2. Terciptanya Integrasi Masyarakat di Rwanda

Masyarakat Rwanda pasca genosida baik Hutu dan Tutsi maupun bekas pelaku kejahatan kembali bersatu. Untuk membangun kembali Rwanda, selain pemerintah, dibantu dengan pihak lain seperti PBB, masyarakat juga sangat kontributif dalam melaksanakan agenda yang ada. Masyarakat menyambut positif program pemerintah yang juga dibentuk bersama PBB dan dilaksanakan bersama mitra lainnya seperti pihak donor dan NGO.

Saat genosida tahun 1994 berlangsung, banyak dari masyarakat pergi mengungsi ke negara-negara tetangga. Pasca genosida, setelah pemerintahan yang baru terbentuk, banyak dari masyarakat Rwanda kembali

dari pengasingan. Diantara masyarakat yang kembali, tidak hanya masyarakat yang mengungsi pasca genosida saja, tetapi masyarakat yang telah lama sekali mengasingkan diri di negara tetangga saat konflik yang terjadi jauh sebelum genosida di Rwanda.

Kembalinya masyarakat Rwanda ke kampung halaman setelah berpuluh-puluh tahun dari pengasingan adalah momen yang mengembirakan bagi mereka. Orang-orang yang kembali ke Rwanda, telah memiliki banyak pengalaman selama bertahun-tahun berada di negara pengasingan. Walaupun mereka yang kembali memiliki banyak pengalaman, ternyata proses reintegrasi masih merupakan proses yang kompleks.⁷³

Untuk mengatasi masalah reintegrasi masyarakat yang kembali ke Rwanda, PBB bekerjasama dengan pemerintah Rwanda mengusulkan program yang bertujuan untuk melengkapi mereka dengan alat yang memudahkan proses reintegrasi mereka kedalam masyarakat Rwanda. Saat kedatangannya, semua masyarakat yang kembali ke Rwanda menerima persediaan makanan yang cukup untuk dikonsumsi selama tiga bulan. Bantuan ini membantu mereka untuk fokus kepada area penting dalam proses reintegrasi tanpa mengkhawatirkan darimana mereka mendapatkan makanan selanjutnya.⁷⁴

⁷³ One UN Rwanda. (2012). *Annual Report 2011*. United Nations.

⁷⁴ *Ibid*

Orang-orang yang kembali ke Rwanda tinggal beberapa di tempat transit Cyangugu atau Gisenyi sebelum mereka diantar kembali ke daerah asal mereka. Pada bulan-bulan selanjutnya UNHCR melaksanakan monitoring program untuk mengatasi masalah yang ada yang dihadapi oleh mereka yang kembali ke Rwanda. Tantangan yang lain yang dihadapi adalah masalah kesehatan, akses pendidikan, atau akses tanah dan properti. Menanggapi masalah tersebut, PBB bekerjasama dengan otoritas distrik untuk membantu mereka yang baru saja kembali ke Rwanda mengatasi hal tersebut.⁷⁵

Melalui intervensi UNDP, UNHABITAT, UNICEF, FAO, WFP dan UNHCR, PBB akan terus mendukung program yang berkelanjutan terkait pengembalian dan penyatuan kembali warga negara Rwanda. Program yang bernama *Return and Reintegration Programme* akan dilaksanakan dalam rentang waktu tiga tahun, yaitu selama tahun 2012-2014. Bersama dengan pemerintah Rwanda, program tersebut dapat membuka jalan bagi orang-orang yang kembali ke Rwanda untuk kembali bersatu dengan komunitasnya.⁷⁶

Program pengembalian dan reintegrasi orang-orang yang berada di pengasingan, berisi komponen-komponen yang kuat yang bertujuan untuk menguatkan struktur nasional terhadap perlindungan dan reintegrasi mereka

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

yang kembali ke Rwanda dalam *framework* prioritas pembangunan nasional. Rencana tersebut dicapai melalui intervensi yang komprehensif di berbagai area yang berbeda seperti akses kepada keadilan, konsolidasi dan perdamaian, kesehatan, pangan, pendidikan, dan manajemen lingkungan. Akses lainnya yang juga menjadi area intervensi adalah akses terhadap sumber daya alam dan tanah, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Rekonsiliasi juga dilakukan terhadap bekas kombatan saat genosida, sekitar 15.000 bekas tentara pemerintah telah diintegrasikan ke dalam tentara nasional Rwanda.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*